

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat tersusun dengan lancar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya selanjutnya disebut LAKIP-SKPD ini merupakan laporan pencapaian Kinerja dalam Tahun 2021, dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sehingga diharapkan program dan kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Kami mengharapkan LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahun 2021 untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semoga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya bersama masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang kita cintai ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

WAMENA, FEBRUARI 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran dicapai dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika rata-rata telah tercapai 79,24% atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa keseluruhannya mendapat kategori berhasil. Keberhasilan yang dicapai tersebut tetap menjadi tolak ukur bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk semakin menyempurnakan kinerja di tahun berikutnya, mengingat tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks.

WAMENA, 24 FEBRUARI 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI.....	4
1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	6
C. SUMBER DAYA	15
D. ASPEK STRATEGI.....	17
E. ISU-ISU STRATEGI.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS.....	22
1. Visi.....	22
2. Misi.....	23
3. Tujuan dan Sasaran.....	23
4. Indikator Kinerja	24
5. Strategi dan Kebijakan.....	25
6. Penetapan Kinerja.....	29
7. Komitmen Kinerja Tahun 2021.....	31
8. Pernyataan Keberhasilan Komitmen.....	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja	35
3.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.3 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	50
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	57
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	58
C. RENCANA TINDAK LANJUT	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan besar dalam membangun *good governance* dan merupakan salah satu faktor utama pendorong pembangunan ekonomi. TIK juga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*) ke depan.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka akuntabilitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja.

Maksud dan tujuan penyusunan LKJ Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2021 dalam rangka mencapai sasaran / target yang telah ditetapkan.

- b. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2018-2023 Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2021.
- c. Sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi;
- i. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- j. Peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
- k. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- l. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. PermennPAN Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Nomor 4 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Jayawijaya tahun 2008 – 2028;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Jayawijaya tahun 2013 – 2018;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2014;
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

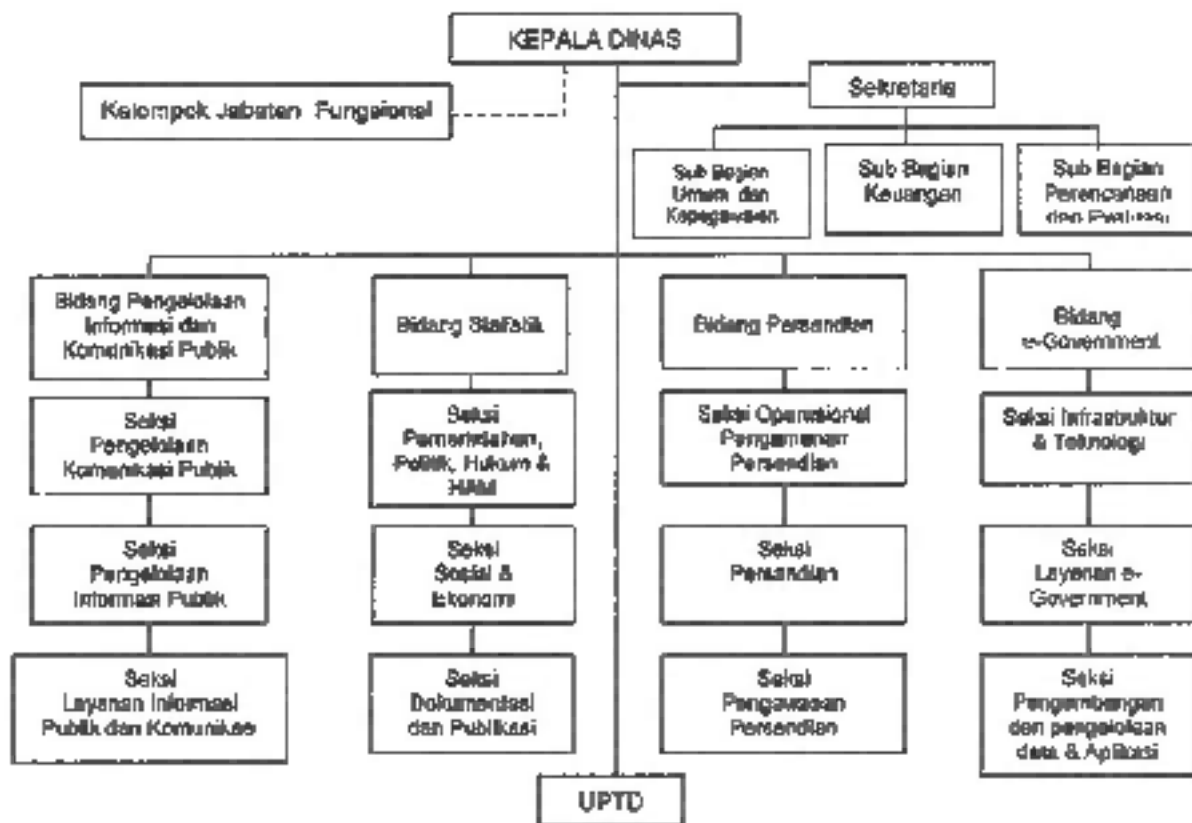
1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - Seksi pengelolaan informasi publik
 - Seksi pengelolaan komunikasi publik
 - Seksi layanan informasi publik & hubungan
3. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas:
 - Seksi infrastruktur dan teknologi
 - Seksi pengembangan dan pengelolaan data & aplikasi
 - Seksi layanan e-Government
4. Bidang Persandian, terdiri atas :
 - Seksi tata kelola persandian
 - Seksi operasional pengamanan persandian
 - Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
5. Bidang Statistik, terdiri atas :
 - Seksi Sosial Ekonomi
 - Seksi pemerintahan, politik, Hukum dan HAM
 - Seksi dokumentasi & publikasi
6. UPT Dinas
 - Sub Bagian Tata Usaha (belum terisi)
7. Kelompok Jabatan Fungsional (belum terisi)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang komunikasi dan informatika yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua. Tugas pokok dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi;
4. Pelaksanaan Pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi;
5. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi Informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

2. TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Sekretaris, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

1.1 Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas surat

mengelola menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan ;
5. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehormatan dinas ;

1.2 Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu

sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan ;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan ;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan ;
4. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan ;
5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional ;
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan ;

7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku ;

1.3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian program mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama ;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama ;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas ;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama ;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral ;
6. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika ;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan ;

8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi publik dan hubungan media ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Dinas

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik ;
- c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

4. TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas.

Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
2. Seksi pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi ;
3. Seksi Layanan e-Government.

2. TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

2. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
3. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
5. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar, dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
6. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
7. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
8. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
9. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas ;

Bidang Persandian, membawahi :

1. Seksi Tata Kelola Persandian ;
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian ;
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

2. TUPOKSI BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pemerintahan, politik, hukum dan HAM ;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi statistik ;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas ;

Bidang Statistik, membawahi :

5. Seksi Sosial Ekonomi ;
6. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM ;
7. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.

3. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas ;

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dlatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dlatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;
2. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki ;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya ;
4. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ;
5. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang bertubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut ;
6. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

C. SUMBER DAYA

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja. Jumlah pegawai di dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Jayawijaya adalah 35 orang, terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Tenaga Kontrak dan 1 orang tenaga IT jaringan. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER/KONTRAK/TENAGA IT
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN PER BIDANG

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Pengolahan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Perencanaan		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Da													
Db													
Dc													
Dd													
II/a	2	1									2	1	3
II/b		1			1		1			1	2	2	4
II/c		1										1	1
II/d							1				1		1
III/a	1	2					2		1		4	3	7
III/b									1		1		1
III/c		2				1				2		5	5
III/d										1		1	1
IV/a	1							1			1	1	2
IV/b		1	1			1					1	2	3
IV/c													
IV/d													
IV/e													
HONORER													
KONTRAK	1	2			1				3		4	2	7
JUMLAH	5	10	1	0	2	2	4	2	5	4	17	18	35
TOTAL	15		1		4		6		9		35		0

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL L2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
DAN TENAGA KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sektor Int		Bidang Pengelolaan Informatika & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Perencanaan		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SE													
SLTP													
SLTA	2	2			1		2			1	3	4	9
D1													
D2													
D3							1	1			1	1	2
S1	2	4			1	1	2	1	2	2	7	10	17
S2	1	1	1			1			2	1	4	3	7
S3													
Jumlah	5	10	1		2	2	4	2	3	4	16	13	35
Total	15		1		4		6		9		35		

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dengan jumlah yang cukup namun perlu ada penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya.

D. ASPEK STRATEGI

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Kominfo di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

Adapun langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menyebarkan informasi melalui media elektronik (Website dan Vidiotron) dan media luar ruangan (BTS);
 - c. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke SKPD oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Peningkatan pelayanan persandian daerah :
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung pembangunan daerah :
 - a. Pengumpulan dan penyusunan data untuk mendukung pembangunan daerah (buku PDIP, LPP, ASPM).

E. ISU-ISU STRATEGI

Delam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil isu-isu strategis sebagai berikut :

Pada bidang Komunikasi dan Informatika isu-isu strategis yang muncul antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum semua desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun wifi;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 3 (tiga) urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok ***“melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”***.

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi.
4. Pelaksanaan Pemberdayaan Informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi.
5. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi.
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 dan Rencana kerja Tahun 2022.

A. Rencana Strategis

1. VISI

Visi sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun visi Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya.”

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Misi kabupaten yang menjadi misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan program yang dicapai oleh dinas.

Adapun misi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan misi satu (1) Kabupaten Jayawijaya yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari setiap misi, yaitu sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan 1.1 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran 1.1.1 Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan Akuntabel

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi

Sasaran 2.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan informasi public

Sasaran 2.1.4 Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja

Sasaran 2.1.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

4. INDIKATOR KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018 - 2023. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Persentase OPD menerapkan SPBE
2. Persentase sistem yang andal dan valid
3. Indeks kepuasan masyarakat
4. Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
5. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	kekuatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Persentase OPD menerapkan SPBE
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas persepsi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

5	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Penerapan anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya
---	--	---	--	--

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Strategi yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika bertumpu pada kondisi strategis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dituangkan dalam rencana strategis Tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD;
2. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya;
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

- 1 Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
- 2 Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamahan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
- 3 Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi;
- 4 Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
- 5 Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya			
MISI : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Menguatnya sistem pemerintah berbasis elektronik dan akuntabel	Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD	Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya;	Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan.	Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparat Dinas Kominfo kab. Jayawijaya

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi pencapaiannya, digambarkan secara jelas pada tabel 2.3

Tabel 2.3

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI di AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Mengurangi sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Persentase OPD menerapkan SPBE	30,76%	38,94	49,29	62,40	78,99	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid	30,76%	38,94	49,29	62,40	78,99	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100
		Meningkatnya kualitas pencapaian akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	57	65	75	80	85	88
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan DPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	10	8	6	4	3	2

6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2018-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2021 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Adapun penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 memuat indikator kinerja utama dinas Komunikasi dan Informatika serta program dan kegiatan yang menunjang untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 dan lampiran perjanjian kinerja tahun 2021.

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan otomatis	Pembertasa OPD menerapkan SPIBE	62,40	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.612.500.000
				Program Aplikasi dan Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Diatapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000
2	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Persentase sistem yang end-to-end valid	62,40	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	328.385.000
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunal Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80.731.000
3	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	62,40	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Praktek Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	74.987.000

				Sub Kegiatan Pengeluaran Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
4	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Pedagogi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhir Realisasi Kerja SKPD	10.000.000
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persetujuan anggaran yang menjadi sebuah material hasil pemrosesan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000

7. Komitmen Kinerja Tahun 2021

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021 digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut :

Misi 1

Tujuan 1.1

Sasaran 1.1.1

Sasaran satu indikator satu menggambarkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD dalam rangka penguatan sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel berupa konektivitas jaringan internet melalui kabel Fiber Optik yang disalurkan ke perangkat daerah dan terintegrasi ke server Dinas Komunikasi dan Informatika maka targetnya naik sebesar 13,11% dari 49,29% di tahun 2020 menjadi 62,40% di tahun 2021 seperti dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Setuan	Kondisi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	%	49,29	62,40

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini Rp 3.612.500.000 dan Rp. 100.000.000,-

Sasaran 1.1.2

Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi dengan meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang baik maka target meningkat 13,11% dari tahun 2020 sebesar 49,29% dan tahun 2021 sebesar 62,40% seperti tertera di tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase sistem yang andal dan valid	%	49,29	62,40

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini Rp. 329.385.000,- dan Rp. 90.721.000

Sasaran 1.1.3

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat. Target indikator ini juga meningkat 13,11% dari tahun 2020 sebesar 49,29% dan tahun 2021 sebesar 62,40% seperti tertera di tabel berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	49,29	62,40

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini Rp 74.987.000,-

Sasaran 1.1.4

Sasaran empat indikator empat menggambarkan meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dengan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya. Adapun target dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	75	80

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini Rp 10.000.000,-

Sasaran 1.1.5

Sasaran lima indikator lima menggambarkan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dengan strategi meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Adapun target dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan materiel hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	6	4

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini Rp 10.000.000,-

8. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja yang diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2021 , diuraikan pada bab tiga ini. Agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya , namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2021. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, , membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, selain itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2021, dan capaian dibanding target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, di uraikan pada tabel 3.8.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 Tujuan1, Sasaran1 yaitu :

➤ **Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel**

Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Persentase OPD menerapkan SPBE. Penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD berupa konektivitas jaringan internet antar perangkat daerah yang terintegrasi ke server dinas komunikasi dan Informatika. Melalui perangkat jaringan fiber optic, sudah 28 perangkat daerah yang terkoneksi ke Dinas komunikasi dan informatika. Dan 1 OPD yang belum yaitu Tanaman Pangan.

Persentase OPD yang menerapkan SPBE

- $$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{28 \text{ OPD}}{29 \text{ OPD}} \times 100\%$$
$$= 96,55 \%$$

- $$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di penda}} \times 100\%$$
$$= \frac{4 \text{ aplikasi}}{7 \text{ aplikasi}} \times 100\%$$
$$= 50 \%$$

- $$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{13 \text{ sub domain}}{29 \text{ PD}} \times 100\%$$
$$= 44,83\%$$
-
-

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat ramai penduduk}}{\text{Jumlah permintaan internet gratis}} \times 100\% \\
 &= \frac{15}{29} \times 100\% \\
 &= 51,72\%
 \end{aligned}$$

Jadi Persentase OPD yang menerapkan SPBE adalah

$$= \frac{96,56\% + 50\% + 44,83\% + 51,72\%}{4}$$

= 60,78 %, capaian kinerja indikator ini dikategorikan cukup berhasil

Tabel 3.1
Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1, Indikator 1

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	62,40	96,50	60,78

Target perangkat daerah yang menerapkan e-government pada tahun 2021 yaitu 62,40 dan dapat direalisasikan 96,50% dengan capaian kinerja 60,78%. Dibandingkan dengan tahun 2020 sedangkan tahun 2020 sebesar 56,31% , selisihnya 4,47%. Angka ini dipengaruhi oleh belum terpasangnya jaringan internet di 1 (satu) OPD yaitu Tanaman Pangan. Skor nilai capaian kinerja dikategorikan cukup berhasil walaupun belum mencapai target renstra tahun 2021.

Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk peningkatan capaian kinerja adalah perlunya peningkatan, pengembangan dan perbaikan dari masing –masing kategori pendukung e-government seperti penyusunan kebijakan tentang e-government, peningkatan infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi terintegrasi, Penganggaran dan Peningkatan SDM bidang TIK, serta penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU
2	Program Aplikasi dan Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DBH

2. **Misi 1 Tujuan1, Sasaran 2 yaitu :**

➤ **Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan Informasi**

Untuk indikator ke dua yaitu **Persentase sistem yang andal dan valid.**

Kualitas dan keandalan data untuk informasi pembangunan daerah Tahun 2020 dilaksanakan dengan mengumpulkan data indeks kemahalan konstruksi (IKK) di 25 tempat usaha di Kabupaten Jayawijaya. Hasilnya data IKK tahun 2020 diperoleh angka 295,03%. Angka ini mengalami penurunan karena jalur transportasi ke Kabupaten Jayawijaya mengalami perbaikan yang membuat arus barang semakin lancar, pemasokan barang semakin melimpah/lancar dan harga semakin menurun atau semakin baik jika dibandingkan dengan data IKK 2019, dimana harga barang mengalami kenaikan karena arus penerbangan ke Kabupaten Jayawijaya yang sempat mengalami penurunan sehingga ketersediaan barang menurun.

Tahun 2021 kegiatan yang mendukung indikator ini adalah tentang pengumpulan dan analisis data statistik yang menghasilkan produk buku PDIP, LPP dan ASPM.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Sumber informasi}} \times 100\% \\
 & = \frac{69}{69} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2, Indikator 2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sistem yang andal dan valid	62,40	100	100

Dari table 3.2 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Persentase sistem yang andal dan valid, capaian kinerja dan realisasi penyerapan dana 100% dari target 62,40%, capaian indikator di katagorkan sangat berhasil karena pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan buku informasi pembangunan daerah didata dengan baik dan dikelola oleh tim kerja menjadi produk yang bermanfaat. Sedangkan untuk layanan keamanan informasi tahun 2021 perangkat daerah belum menggunakan layanan pengamanan informasi dikarenakan payung hukum masih diusun.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DBH
2	Program Penyelenggaraan Persendian Untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persendian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	DBH

3. **Misi 1 (satu) Tujuan1 (satu), Sasaran 3 (tiga) yaitu :**

➤ **Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik**

Untuk indikator ke Tiga dari sasaran tiga yaitu Indeks kepuasan masyarakat. Informasi public tentang semua aktifitas kegiatan pemerintah daerah dapat diakses dengan mudah melalui website pemda yang dikelola oleh tim pengelola website.

Adapun pelayanan publik yang dilaksanakan secara manual menggunakan sarana mobil publikasi/mobil halo-halo dan secara on line melalui website pemda. Namun tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika belum bisa melakukan publikasi secara manual/mobil publikasi/ karena sarana mobil nya sudah tidak ada/terbakar sehingga hanya dilakukan secara on line yaitu melalui website pemda dan pelayanan publik yang ditayangkan secara visual melalui vidiotron sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah.

- $$\frac{\text{Jumlah Artikel informasi yang terupload di website}}{\text{Jumlah Artikel informasi yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{250} \times 100\%$$

$$= 12,8 \%$$

- $$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah permintaan penyiaran berita}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{40} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

• Total capaian kinerja indikator 3 tahun 2021 adalah

$$\frac{12,8 \% + 100\%}{2}$$

= 56,4 % capaian kinerja indikator ini dikategorikan cukup berhasil

Capaian indikator tiga tahun 2021 yaitu 56,4% mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yaitu 56,75% hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi yang sedang terjadi sehingga mempengaruhi keterbatasan aktivitas.

Tabel 3.3

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3, Indikator 3

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan masyarakat	49,29	98,98	56,4

Dari tabel 3.3 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Indeks kepuasan masyarakat capaian realisasinya 56,4 dari target 49,29, dan realisasinya 98,98 dari capaian indikator di katagorikan cukup berhasil.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut .

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	DBH

4. Misi 1 (satu), Tujuan 1 (satu), Sasaran 4 (empat) yaitu :

➤ **Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja**

Untuk indikator ke empat dari sasaran empat yaitu Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dalam rangka meningkatkan predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya ditentukan dari penguatan komitmen pimpinan sebagai strategi utama yang dimulai dari dokumen perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan harus mulai dimonitor secara berkala, diukur, dievaluasi serta dijadikan dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Tolok ukur penerapan mekanisme tersebut terdapat perbedaan antara pejabat/pegawai yang berhasil mencapai target kinerja dengan yang tidak mencapai target kinerja.

Table 3.4

Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 4, Indikator 4

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	75	100	79

Dari table 3.4 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya capaian realisasinya 79 dari target 75% dan realisasinya 100%. dari capaian indikator di katagorikan berhasil. Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika masih rendah dikarenakan kelemahan system kinerja antara lain kurangnya pembinaan sakis, penguatan komitmen dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, pemanfaatan pengukuran kinerja, dan penganggaran berbasis kinerja.

Nilai evaluasi LKIP dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ekpetansi nilai atau target yang tertera di Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Nilai evaluasi LAKIP didapatkan dari hasil penilaian oleh Inspektorat Kota Bandung melalui dokumen nomor 700/96/LHE/INSP/2020, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mendapatkan nilai LAKIP sebesar 59,26 (lima puluh sembilan koma dua enam) dengan kategori CC. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi selain itu nilai tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerja cukup memadai, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk dipertanggungjawabkan, namun masih perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Nilai ini berada di bawah target Renstra 2018-2023 yang ditetapkan, sebesar 75.

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Capaian indicator 4} &= \frac{\text{Nilai Evaluasi LAKIP yang diterima}}{\text{Target Nilai Evaluasi LAKIP}} \times 100 \% \\ &= \frac{59,26}{75} \times 100\% \\ &= 79 \% \end{aligned}$$

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU

6. Misi 1 (satu) Tujuan1 (satu), Sasaran 5 (lima) yaitu :

➤ **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**

Untuk indikator ke Lima dari sasaran Lima yaitu Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan memberikan masukan serta rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Inspektorat adalah lembaga internal yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi atas berjalannya system birokrasi di Pamerintah kabupaten Jayawijaya, baik dari sisi keuangan, prosedur, dan sebagainya. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen berisi temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Melakukan tindak lanjut atas temuan adalah hal mutlak bagi berjalannya birokrasi yang bersih, dan melayani.

- Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK}}{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah 0% karena Dinas Komunikasi meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dengan cara menggunakan anggaran belanja sesuai posnya, menyusun dan mengumpulkan laporan keuangan dan laporan aset tepat waktu. Hasil persentase 0% artinya capaian kinerja pengelolaan keuangan 100% artinya sangat berhasil dengan tidak adanya temuan BPK.

Tabel 3.5
Indikator kinerja Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2, Indikator 2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	4	100	0

Dari table 3.5 di atas dapat diuraikan penjelasan indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya capaian realisasinya 0 dan target 4 dan realisasinya 100%. Dari capaian indikator di katagorikan sangat berhasil karena Untuk menghindari temuan pemeriksaan BPK, Dinas Komunikasi meningkatkan sistem pengendalian intern dalam

pengelolaan keuangan dengan cara menggunakan anggaran belanja sesuai posnya, menyusun dan mengumpulkan laporan keuangan dan laporan aset tepat waktu.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Uporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DAU

Adapun indikator dari program dan kegiatan pendukung indikator kinerja utama yang menunjang keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu kegiatan rutin yang diukur berdasarkan indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :

6. Untuk indikator pendukung pertama yaitu Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator ini memiliki satu program empat kegiatan dan Sembilan sub kegiatan yang terdiri dari Kegiatan pertama pemenuhan layanan administrasi umum sub kegiatannya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan logistik Kantor, Penyediaan Berang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan kedua, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatannya Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya . Kegiatan ketiga Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan keempat pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sub kegiatannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan.

Tabel 3.8
Tingkat capaian kinerja
Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	TARGET RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI SKOR KINERJA
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	62,40	80,78	CUKUP BERHASIL
2	Persentase sistem yang andal dan valid	82,40	100	SANGAT BERHASIL
3	Indeks kepuasan masyarakat	62,40	56,4	CUKUP BERHASIL
4	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	80	79	BERHASIL
5	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	4	100	SANGAT BERHASIL

- Rata-rata tingkat capaian kinerja adalah

$$= \left[60,78 + 100 + 56,4 + 79 + 100 \right]$$

$$= \frac{396,18}{5} \times 100 \%$$

$$= 79,24 \%$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan indikator kinerja sasaran yang diraih dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 79,24% sehingga dapat dikategorikan berhasil.

3.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar dari maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh ketersediaan sumber daya baik Sumber daya manusia maupun prasarana pendukung untuk pencapaian kinerja Dinas. Tahun 2021 ASN dan pegawai kontrak Dinas Kominfo berjumlah 29 orang terdiri dari 16 pejabat struktural, 6 orang Staf Pelaksana Umum dan 7 orang tenaga kontrak. Dari sumber daya sarana dan prasarana kantor dan infrastruktur TIK untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah tersedianya Jaringan internet yang terkoneksi ke SKPD, website dan vidotron.

3.1 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.3.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2021 sebesar 79,24 %. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparatur sipil Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi informasi berupa jaringan internet dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3.2 Analisa Kegagalan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kominfo tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan / hambatan adalah :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia dalam mempublikasikan informasi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Belum maksimalnya penggunaan sub domain pada opd untuk mengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
6. Kurangnya dukungan/perhatian dari Tim anggaran dalam merealisasikan program dan kegiatan yang diusulkan.

3.3.3 Analisa alternatif / Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kominfo Kabupaten Jayawijaya dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis dibidang komunikasi dan Informasi, statistik dan persandian.

3. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas Kominfo, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada OPD dalam pemanfaatan media Informasi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).
6. Adanya komitmen dalam merealisasikan program dan kegiatan yang diuulkan ke Tim Anggaran.

3.3.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2021 ini akan dipaparkan capaian kinerja program secara keseluruhan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten jayawijaya.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Kominfo Kabupaten jayawijaya, yaitu :

Tabel 3.9

Analisa Program/kegiatan/sub kegiatan pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Aplikasi dan Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	60,78	97	1
2	Program penyelenggaraan statistik sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100	99,68	1
3	Program Informasi dan Komunikasi publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	58,4	100	1
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	70	100	1
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Uporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	100	1
JUMLAH		398,18	96,34	1

Dari tabel diatas, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 telah mencapai efiseinsi sebesar yaitu 1 dari dari rata-rata capain kinerja program yang telah dilaksanakan sebesar 396,18% dengan penyerapan anggaran 99,34%. Secara umum pencapaian kinerja dan efisiensi dari aspek program telah dicapai karena realisasi anggaran lebih kecil dari pada realisasi capalan kinerja.

3.3.5 Akuntabilitas Keuangan

a. Alokasi dan Realisasi Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan, selain faktor pendukung adapula faktor keuangan yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target capaian indikator keberhasilan. Aktifitas keglatan yang menunjang indikator kinerja sasaran dapat berjalan bila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pembiayaan dalam APBD diuraikan dalam 2 kelompok belanja yaitu, belanja operasi dan belanja modal. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, alokasi dana pada dinas Kominfo kabupaten Jayawijaya tahun 2021 adalah Rp. 6.321.899.046,- (sebelum perubahan) dan setelah perubahan sebesar Rp. 7.688.575.723,- terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 6.123.111.046,- (sebelum perubahan), dan setelah perubahan Rp. 7.490.787.723,- selisih perubahan anggaran sebesar Rp. 1.367.676.677,- sedangkan belanja modal Rp.198.788.000,- (sebelum perubahan) dan Rp. 198.788.000,- (setelah perubahan), berarti tidak terdapat perubahan anggaran. Belanja operasi dipergunakan untuk membayar belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal dipergunakan untuk pelaksanaan belanja modal.

Sedangkan realisasi Belanja pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.179.892.940,- (97,71%) meliputi Belanja operasi Rp. 6.981.104.940,- (97,58%) dan Belanja modal Rp. 198.788.000,- (100 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Realisasi anggaran belanja

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I.	Belanja		7.689.579.723	7.179.892.940	97,71%
A.	Belanja Operasi		7.490.787.723	6.861.104.840	97,66%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.875.084.500	1.873.953.600	99,94%
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.753.313.803	2.503.818.042	90,94%
	2.16.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.480.820	200.652.578	99,59%
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.788.000	199.788.000	100%
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.608.800.000	3.653.900.000	93,52%
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000	18.898.000	78,73%
2	Program Informasi dan Komunikasi publik		74.987.000	74.987.000	100%
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.987.000	74.987.000	100%
3	Program Aplikasi Informatika		100.000.000	100.000.000	100%
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemennah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		329.385.000	328.458.886	99,72%
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	329.385.000	328.458.886	99,72%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		90.721.000	90.394.434	99,64%
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.721.000	90.394.434	99,64%

Dari tabel diatas diperoleh capaian realisasi sebesar 97,71% sangat dipengaruhi oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99,94% ;
2. Program Informasi dan Komunikasi publik 100% ;
3. Program Aplikasi Informatika 100% ;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 99,72%;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 99,64%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya secara umum telah berhasil dilaksanakan. Kesimpulan yang diambil bahwa sasaran yang ditetapkan oleh dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2021 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kinerja capaian memenuhi capaian target dengan kategori berhasil, walaupun dalam penyerapan anggarannya ada beberapa yang belum 100%. Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diraih pada tahun 2021 ini pada prinsipnya tidak boleh berhenti, akan tetapi harus selalu disempurnakan di masa-masa mendatang, sehingga perlu dirumuskan strategi yang akan dijadikan dasar kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sebagaimana termuat dalam rencana tindak lanjut yang diuraikan dalam poin C pada bab ini.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 terdapat beberapa hambatan permasalahan yaitu :

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standar/keasli yang berlaku;
5. Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD;

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Permasalahan yang ada serta kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal pada tahun 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan antisipasi dan prioritas pada :

- 1) Mengikuti Pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur,
- 2) Sosialisasi Internal akan pentingnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dinas dengan mengundang Bagian ORPAN/ Inspektorat sebagai narasumber,
- 3) Memotivasi pegawai negeri sipil yang ada agar dapat meningkatkan kinerja dan disiplin;
- 4) Komitmen dan kebijakan pimpinan dalam menetapkan kegiatan dan menyediakan anggaran belanja kegiatan;
- 5) Menyediakan *data center* yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet sehingga penyelenggaraan SPBE lebih optimal;

- 6) Menyediakan Perangkat keras yang dibutuhkan di bidang persandian untuk tindakan pengamanan informasi terhadap perangkat daerah;
- 7) Penyediaan Aplikasi data dan informasi untuk menampung data yang diinput dari OPD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2021.

Wamena, 24 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19710806 199712 1 001**